

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama dalam politik Indonesia telah lama dipandang sebagai salah satu variabel penentu dalam perilaku pemilih. Identitas keagamaan sering dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik, terutama di wilayah dengan basis sosial-keagamaan yang kuat. Wahyu Saputra dan Muhsin (2023) menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi Islam dalam ranah politik praktis memiliki dampak signifikan terhadap arah preferensi masyarakat. Senada dengan itu, Alexander Arifianto (2024) menegaskan bahwa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kapasitas mobilisasi luas, sehingga dukungan berbasis agama kerap dipersepsikan sebagai modal elektoral yang relatif stabil. Dalam kerangka tersebut, lahir asumsi umum bahwa keterikatan religius masyarakat akan terkonversi secara otomatis menjadi dukungan politik bagi partai yang dianggap mewakili identitas mereka.

Asumsi ini memiliki akar historis yang kuat, terutama di Kabupaten Demak. Sejak abad ke-15, Demak telah dikenal sebagai pusat perkembangan Islam di Jawa. Kesultanan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan menjadi basis dakwah para wali (Sunyoto, 2016). Tradisi tersebut kemudian melembaga dalam bentuk pesantren dan budaya Islam tradisional yang diwariskan lintas generasi. Hal inilah yang

menjadikan Demak sebagai tanah subur bagi NU untuk membangun basis dukungan.

Dominasi NU di Demak semakin nyata dalam Pemilu 1955. Saat itu NU sebagai partai politik berhasil meraih sekitar 18,41 persen suara nasional, menduduki posisi ketiga setelah PNI dan Masyumi, dengan basis suara yang kuat di Jawa Tengah termasuk Demak (KPU, 1955). Herbert Feith (Feith, 2007) menunjukkan bahwa dukungan NU terutama berasal dari kawasan pedesaan Jawa, yang memperkuat posisi partai ini dalam konfigurasi politik nasional. Pasca fusi politik pada masa Orde Baru, basis NU diarahkan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun setelah Reformasi 1999, basis tersebut bermigrasi besar-besaran ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang didirikan sebagai representasi politik warga Nahdliyin (2009). Tidak mengherankan jika PKB kemudian identik dengan Demak sebagai "daerah hijau". Martin van Bruinessen (2013) mencatat bahwa sejak awal Reformasi, PKB memang merepresentasikan NU, sehingga secara politik menguasai wilayah tradisional seperti Demak.

Hegemoni tersebut masih tampak pada Pemilu Legislatif 2024. Data KPU Kabupaten Demak mencatat bahwa PKB meraih 168.701 suara, mengungguli PDI Perjuangan dan Golkar (Dinkominfo Kabupaten Demak, 2024). Namun dominasi itu tidak otomatis berlanjut di Pilkada. Pada Pilkada Demak 2024, PKB bersama koalisi partai besar yakni NasDem, Gerindra, Demokrat, dan PPP mengusung pasangan Edi Sayudi-Eko Pringgolaksito. Jika dihitung dari komposisi DPRD Demak hasil Pilkada 2024, koalisi ini menguasai 30 kursi dari total 50 kursi DPRD (60%), terdiri atas PKB 13 kursi, Gerindra 7 kursi, NasDem 5 kursi, Demokrat 3

kursi, dan PPP 2 kursi. Dengan dukungan mayoritas legislatif ini, pasangan Edi-Eko diprediksi mampu mempertahankan dominasi PKB. Namun, hasil resmi KPU Demak justru menunjukkan pasangan Eisti'anah-M. Badruddin, yang diusung oleh PDI Perjuangan (12 kursi), Golkar (7 kursi), dan PKS (1 kursi) dengan total 20 kursi DPRD (40%), unggul dengan 353.209 suara (54%), sedangkan Edi-Eko hanya memperoleh 296.948 suara (46%) (KPU Kab. Demak, 2024). Kekalahan ini mengejutkan karena terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara PKB, sekalipun pasangan Edi-Eko didukung oleh koalisi partai dengan kekuatan mayoritas di DPRD. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pergeseran perilaku pemilih. Survei Litbang Kompas (2023) mencatat bahwa elektabilitas PKB di kalangan warga NU secara nasional menurun ke posisi ketiga, di bawah PDI Perjuangan dan Gerindra.

Fitriyah (Fitriyah, 2017) menemukan bahwa dalam Pilkada lokal di Demak, preferensi pemilih sering lebih dipengaruhi oleh faktor pragmatis seperti kinerja kandidat maupun hubungan patron-klien. Selain faktor religius, politik lokal juga sangat erat dengan dimensi ekonomi. Di balik kontestasi elektoral kerap muncul “deal” politik-ekonomi, di mana dukungan finansial dari aktor bisnis menjadi salah satu penentu konfigurasi kekuasaan. Joe Studwell (2007) dalam kajian tentang Asia Tenggara menunjukkan bahwa praktik patronase antara elite politik dan pengusaha membentuk struktur oligarki yang sulit ditembus, di mana modal ekonomi berfungsi sebagai tiket masuk ke arena politik. Dalam konteks Demak, Fitriyah (Fitriyah et al., 2021) menambahkan bahwa aktor bisnis kerap terlibat dalam

Pilkada sebagai investor politik dengan harapan imbalan kebijakan di kemudian hari.

Jika ditinjau dari fungsi partai dalam ranah elektoral, dinamika keberhasilan maupun kegagalan partai politik dalam pemilu dapat dipahami secara lebih komprehensif. Sigit Pamungkas (Pamungkas, 2011) menjelaskan bahwa partai politik memiliki tiga fungsi utama dalam sistem demokrasi elektoral, yaitu fungsi kandidasi, fungsi marketing politik, dan fungsi mobilisasi pemilih.

Fungsi kandidasi berkaitan dengan peran partai dalam merekrut serta mencalonkan kandidat yang dianggap mampu mewakili aspirasi publik. Dalam praktiknya, proses kandidasi sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh representasi sosial, tetapi juga oleh kapasitas kandidat dalam menyediakan dukungan sumber daya, termasuk finansial dan jaringan politik. Fungsi marketing politik mencakup upaya partai dalam merumuskan, mengemas, dan memasarkan gagasan politik maupun kandidat yang diusung kepada masyarakat. Strategi ini sangat bergantung pada kemampuan partai dalam mengelola sumber daya ekonomi, komunikasi, dan teknologi informasi. Sementara itu, fungsi mobilisasi pemilih menggambarkan kemampuan partai untuk menggerakkan serta mempertahankan dukungan masyarakat. Mobilisasi tersebut kini tidak hanya bertumpu pada basis ideologis atau kultural, tetapi juga pada praktik patronase dan pembentukan aliansi yang bersifat pragmatis.

Pilkada Demak 2024 menunjukkan bahwa kekuatan historis NU dan kedekatannya dengan PKB tidak lagi otomatis menjamin kemenangan. Basis sosial-keagamaan masih penting, tetapi kini berinteraksi dengan faktor lain seperti

ekonomi-politik, strategi kandidasi, elektoral dan marketing policy. Hal ini menandakan adanya perubahan pola dukungan di wilayah yang selama ini dikenal sebagai “lumbung suara hijau”. Karena itu, menelaah dinamika elektoral PKB di Demak 2024 menjadi penting untuk memahami bagaimana partai berbasis religius menghadapi perubahan politik lokal yang semakin kompleks.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fenomena kekalahan partai dominan di basis tradisional bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Raenaldy Yoga Pratama, Bandiyah, dan Tedi Erviantono (2013) meneliti kekalahan PDI-P dalam Pemilu Kluwung tahun 2013. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antara elite pusat dan daerah serta hadirnya figur alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi faktor utama kekalahan PDI-P di basis kuatnya. Dalam konteks lain, Jazuli (2015) menemukan bahwa koalisi besar tidak menjamin kemenangan kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 jika tidak didukung konsolidasi internal yang solid dan figur kandidat yang kuat. Sementara itu, Alamsyah dan Hasan (2018) mengungkapkan bahwa hilangnya kepercayaan publik dan absennya figur kharismatik menyebabkan Partai Aceh mengalami kekalahan pada Pilkada 2017 di Aceh Besar, meskipun partai tersebut memiliki basis ideologis yang kuat. Ketiga penelitian ini menunjukkan pola umum: dominasi historis dan simbolik dapat runtuh bila kepercayaan publik menurun, koordinasi internal melemah, atau muncul figur tandingan yang lebih meyakinkan.

Dengan memperhatikan fenomena Pilkada Demak 2024, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian yang sudah ada. Kebaruan tesis ini terletak pada analisis

komprehensif terhadap kekalahan PKB di Demak sebagai daerah yang secara historis identik dengan basis NU. Penelitian ini mengintegrasikan dimensi historis-identitas dengan faktor ekonomi-politik, strategi komunikasi, serta kecenderungan rasionalisasi perilaku pemilih. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa dominasi simbol keagamaan yang selama ini menjadi modal utama partai Islam dapat terkikis ketika tidak disertai konsolidasi internal dan strategi adaptif dalam menghadapi dinamika politik lokal yang semakin kompleks.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa PKB yang memiliki basis politik kuat di Demak mengalami kekalahan pada Pilkada 2024?
2. Faktor apa yang menyebabkan PKB gagal dalam Pilkada Demak 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penyebab kekalahan PKB pada Pilkada Demak 2024 meskipun memiliki basis politik yang kuat di daerah tersebut.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan PKB dalam Pilkada Demak 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Akademis

1. Memberikan kontribusi pada kajian ilmu politik, khususnya mengenai fungsi partai dalam pemilu dan perilaku pemilih dalam kontestasi lokal.
2. Menambah referensi empiris mengenai dinamika politik lokal di Indonesia.

b. Praktis

1. Menjadi masukan bagi PKB maupun partai lain dalam mengevaluasi strategi politik dan pengelolaan mesin partai pada level daerah.
2. Memberikan pemahaman bagi pengamat politik dan masyarakat terkait faktor-faktor yang memengaruhi hasil pilkada.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian tentang kekalahan partai politik maupun kandidat dalam pemilu dan pilkada memberikan banyak perspektif untuk memahami kasus PKB di Demak. Raenaldy Yoga Pratama, Bandiyah, dan Tedi Erviantono (2013) dalam *“Kekalahan PDI-P dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung Tahun 2013”* menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI-P kalah karena rekomendasi DPP yang turun terlambat, lemahnya sosialisasi kandidat, dan ketidaksolidan kader di lapangan. Kehadiran figur alternatif yang dekat dengan masyarakat juga menggerus loyalitas terhadap partai. Studi ini menegaskan bahwa faktor simbol partai saja tidak cukup, dan sinkronisasi antara keputusan elit pusat dengan kondisi lokal sangat menentukan. Dalam konteks Demak, hal ini mengisyaratkan bahwa kendati PKB identik dengan NU dan punya basis kuat, jika sosialisasi calon lemah atau figur yang dipilih tidak diterima, maka peluang kalah terbuka lebar.

Hal serupa disampaikan Jazuli (2015) melalui artikelnya *“Efektivitas Koalisi Gemuk Parpol Pilkada DKI Jakarta 2012”*. Dengan menggunakan teori

koalisi Lijphart dan arena koalisi Heywood, ia menelaah mengapa koalisi besar partai politik gagal melawan pasangan Jokowi-Ahok. Ia menemukan bahwa koalisi gemuk cenderung pragmatis dan transaksional sehingga tidak menghadirkan soliditas di tingkat kader. Mesin partai justru tumpul menghadapi kekuatan figur populer yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa koalisi besar yang dibangun PKB di Demak pada 2024 tidak otomatis menjamin kemenangan jika tidak diiringi konsolidasi mesin partai dan kehadiran figur yang kuat di mata pemilih.

Penelitian Alamsyah dan Hasan (2018) berjudul “*Kekalahan Calon Bupati/Wakil Bupati yang Diusung Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Besar*” melengkapi analisis dengan menunjukkan faktor turunnya kepercayaan publik. Mereka menggunakan metode kualitatif dengan wawancara tokoh lokal dan analisis dokumen. Hasilnya menegaskan bahwa absennya figur kharismatik, lemahnya konsolidasi tim pemenangan, dan menurunnya reputasi partai membuat basis dukungan Partai Aceh tergerus. Ini paralel dengan kemungkinan faktor di Demak, di mana meski PKB punya basis tradisional NU, faktor kepercayaan publik terhadap kandidat yang diusung lebih menentukan arah suara.

Asdar Abidin dan Muh. Iqbal Sultan (2011) dalam “*Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013*”: Studi Strategi Kampanye Politik” menguraikan kegagalan Golkar dari sisi strategi kampanye. Dengan menggunakan analisis SWOT dan wawancara mendalam, mereka menemukan bahwa pesan kampanye tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat lokal, media yang digunakan tidak efektif, dan keuntungan petahana membuat kandidat Golkar kalah bersaing. Penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi yang buruk dapat meruntuhkan basis dukungan, relevan dengan PKB di Demak bila kampanye mereka gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Sementara itu, Choirul Fajri dan Dani Fadillah (2017) dalam “*Analisa Kegagalan Komunikasi Politik dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman*” lebih menekankan pada aspek komunikasi internal dan eksternal. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan analisis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDIP kalah karena kader tidak solid, isu-isu strategis tidak dibingkai dengan baik, dan media sosial tidak dimanfaatkan untuk meraih pemilih muda. Studi ini memberi pelajaran penting: kegagalan komunikasi digital dan lemahnya koordinasi internal juga bisa menjadi penyebab utama kekalahan, termasuk dalam konteks Demak.

George Towar Ikbil Tawakkal (2025) melalui artikelnya “*What Election is This? Candidate Versus Party Contests in Indonesia*” menelaah 400 percakapan pemilih untuk memahami bagaimana publik memaknai pemilu. Temuannya cukup unik: meskipun sistem proporsional terbuka memberi ruang lebih pada kandidat, pemilih Indonesia tetap cenderung melihat pemilu sebagai pertarungan partai. Namun, ia juga menekankan bahwa label partai saja tidak cukup jika kandidat yang diusung tidak sesuai harapan pemilih. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan dinamika ganda: partai penting, tetapi figur tetap menjadi penentu.

Hasto Kristiyanto dkk. (2023) dalam *“Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy”* menambahkan dimensi kelembagaan. Studi kualitatif ini menekankan bahwa pelebagaan partai yang kuat melalui struktur, kaderisasi, dan akar sosial dapat meningkatkan daya tahan menghadapi fragmentasi politik. Namun, pelebagaan saja tidak menjamin kemenangan elektoral, karena personalisasi dan popularitas kandidat tetap berperan besar. Hal ini memperlihatkan bahwa PKB di Demak yang secara historis terinstitusionalisasi tetap bisa kalah bila faktor personalisasi tidak terkelola dengan baik.

Marcus Mietzner (2014) melalui artikel *“How Jokowi Won and Democracy Survived”* menguraikan kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014. Dengan analisis kualitatif dan wawancara aktor kunci, ia menyimpulkan bahwa kekuatan figur populis moderat dan dukungan relawan akar rumput mampu menandingi dominasi mesin partai besar. Temuan ini menegaskan bahwa figur dan gerakan relawan bisa menjadi penentu lebih besar daripada struktur partai formal. Kasus ini paralel dengan Pilkada Demak, di mana figur lawan PKB bisa jadi lebih berhasil membangun resonansi personal dan dukungan akar rumput.

Stevan T. M. Sianturi dan Fredick B. Ekayanta (2023) dalam artikelnya *“Kekalahan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”* menelaah kekalahan Golkar dengan fokus pada faktor internal partai. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa konflik internal, faksionalisasi, serta absennya koalisi dengan partai lain membuat Golkar kehilangan daya tawar. Meskipun

Golkar memiliki basis yang kuat, perpecahan di internal dan lemahnya mesin partai menyebabkan dukungan masyarakat terpecah. Studi ini menekankan bahwa soliditas internal menjadi syarat mutlak kemenangan, relevan untuk memahami apakah PKB di Demak mengalami perpecahan internal yang melemahkan mesin politiknya.

Adrien Petitpas (2024) dalam “Media Coverage, Advertising, and Electoral Volatility” menyoroti hubungan antara kampanye media dan hasil elektoral. Ia menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas media massa dan iklan politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media dan iklan hanya efektif jika publik menilai partai atau kandidat kompeten; sebaliknya, jika reputasi mereka buruk, kampanye sebesar apa pun tidak akan memengaruhi hasil pemilu. Hal ini memberi pelajaran bahwa PKB meski memiliki akses kampanye yang luas, tetap akan gagal jika persepsi publik terhadap kandidatnya rendah.

Dari sisi finansial, Effendi dan Handoko (2025) dalam “*Political Dowry in Indonesia’s Local Election*” menemukan bahwa mahar politik atau *dowry* merupakan praktik umum dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan kandidat dan elite partai. Temuannya, mahar politik bukan hanya membatasi calon potensial, tetapi juga membebani kandidat hingga mengurangi ruang geraknya dalam kampanye. Sejalan dengan itu, Hidayaturrahman dkk. (2020) dalam “*Political Investor and Local Oligarchy*” menegaskan peran investor politik yang membiayai kandidat dengan imbalan akses kebijakan pasca terpilih. Investor ini bahkan dapat mengendalikan jalannya pemerintahan daerah. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal

kerap tersandera oleh kepentingan finansial, sesuatu yang juga patut dicermati dalam kekalahan PKB di Demak.

Ikhsan dkk. (2024) dalam artikelnya “*Patronage and Political Recruitment: Bobby Nasution’s Candidacy*” mengkaji bagaimana proses kandidasi di Indonesia masih sangat elitis. Studi ini menemukan bahwa keputusan siapa yang maju sebagai calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh patronase dan kedekatan dengan elit pusat, bukan aspirasi kader lokal. Kasus pencalonan Bobby Nasution di Medan menjadi bukti nyata dominasi patronase. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan kasus Demak, di mana pencalonan kandidat PKB juga bisa jadi lebih ditentukan oleh kepentingan elit pusat dibanding dinamika aspirasi lokal.

Studi komparatif, Mohd. Nadzri (2018) dalam “*The Fall of Barisan Nasional*” menjelaskan bahwa kekalahan BN yang telah lama berkuasa di Malaysia disebabkan krisis legitimasi, perpecahan *elite*, serta kemunculan oposisi inklusif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa partai dominan tidak kebal dari kekalahan jika gagal menjaga legitimasi dan membiarkan fragmentasi internal. Sementara itu, O’Dwyer (2022) dalam “*Local-Level Democratic Backsliding? The Consolidation of Aspiring Dominant-Party Regimes in Hungary and Poland*” menguraikan regresi demokrasi di Hungaria dan Polandia, di mana partai dominan berusaha menguatkan kontrol di tingkat lokal. Namun hasilnya bervariasi antarwilayah, menunjukkan bahwa dominasi partai tidak selalu stabil. Keduanya memperlihatkan konteks global di mana partai dominan bisa kehilangan kekuasaan, memberikan cermin bagi PKB di Demak.

M. Abdullah Nastain (2024) dalam “*Cultural Barrier in the Regeneration Process of Islamic Political Party in Indonesia*” meneliti hambatan regenerasi partai Islam di Indonesia. Dengan metode kualitatif, ia menemukan bahwa budaya senioritas, patronase, dan paternalistik membuat kaderisasi berjalan lambat dan partai Islam kesulitan menyesuaikan diri dengan pemilih baru. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis Islam seperti PKB rentan kalah jika gagal memperbaharui kepemimpinan dan strategi. Ariansyah dkk. (2024) dalam “*Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang*” meneliti kekalahan petahana di Padang. Temuannya, buruknya pelayanan publik, lemahnya kepemimpinan, dan memburuknya kondisi sosial-ekonomi membuat pemilih memberikan hukuman elektoral (*punishment voting*). Hal ini menunjukkan bahwa pemilih semakin rasional, tidak hanya terikat identitas partai.

Dari keseluruhan jurnal diatas terlihat pola konsisten: partai dominan dan basis historis tidak lagi menjamin kemenangan elektoral. Figur kandidat, soliditas internal, strategi komunikasi, reputasi publik, kondisi sosial-ekonomi, serta praktik patronase dan finansial justru memainkan peran lebih besar. Bahkan politik identitas pun, meskipun penting, tidak otomatis menjamin kemenangan tanpa kemasan strategi yang tepat. Kebaruan tesis ini adalah menghadirkan analisis komprehensif tentang kekalahan PKB di Demak 2024 dengan menggabungkan faktor historis-identitas NU, patronase ekonomi-politik, strategi komunikasi, dan perilaku pemilih rasional. Dengan demikian, tesis ini menutup celah penelitian terdahulu yang biasanya hanya menekankan satu faktor atau kasus di daerah lain, dan menawarkan sintesis utuh tentang bagaimana basis religius yang selama ini

menjadi modal utama partai Islam ternyata tidak lagi cukup dalam menghadapi kompleksitas politik lokal yang berubah.

1.5.2. Landasan Teoritis

Partai politik merupakan salah satu elemen paling mendasar dalam sistem demokrasi modern. Melalui partai, aspirasi rakyat dapat disalurkan ke dalam proses politik formal, terutama dalam konteks perebutan dan pengelolaan kekuasaan melalui pemilihan umum. Sigit Pamungkas (2011) menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang berorientasi pada kekuasaan dan menjadikan pemilu sebagai mekanisme utama untuk memperoleh legitimasi politik. Menurutnya, partai bukan hanya sekadar wadah representasi, melainkan aktor strategis yang menentukan arah kekuasaan melalui proses elektoral yang sah dan konstitusional.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran klasik Giovanni Sartori yang mendefinisikan partai politik sebagai “kelompok yang terorganisasi untuk memperoleh kekuasaan publik melalui dukungan rakyat.” Sartori menekankan bahwa kekuasaan politik dalam demokrasi tidak dapat diperoleh tanpa adanya organisasi yang mampu menghimpun suara secara terstruktur dan itulah fungsi utama partai.

Sementara Maurice Duverger menegaskan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisasi yang berupaya merebut kekuasaan dengan menempatkan anggotanya dalam jabatan publik. Duverger menggarisbawahi bahwa keberadaan partai identik dengan upaya sistematis untuk berkompetisi dalam pemilu. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi yang tak tergantikan dalam menjaga kesinambungan demokrasi elektoral.

Dalam konteks Indonesia, Lutfi dan Satriawan (2015) memandang partai sebagai lembaga demokrasi konstitusional yang menjadi penghubung antara rakyat dan negara. Partai tidak hanya berperan dalam pembentukan pemerintahan, tetapi juga dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pemilihan umum secara rasional.

Lebih jauh, Sigit Pamungkas (2011) menegaskan bahwa partai politik berbeda dari organisasi sosial atau kelompok kepentingan lainnya karena orientasinya bersifat elektoral partai bertujuan untuk menguasai kekuasaan secara legal melalui kontestasi pemilu. Dalam kerangka tersebut, seluruh aktivitas partai diarahkan untuk memperoleh dukungan publik dan mengubahnya menjadi kekuatan elektoral yang sah. Ia menekankan bahwa keberadaan partai politik menjadi indikator utama dari berfungsinya sistem demokrasi representatif, sebab tanpa partai, proses politik hanya akan didominasi oleh kekuatan individual atau birokratik tanpa legitimasi rakyat.

Dengan demikian, partai politik dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang menjadi jembatan antara rakyat dan negara serta berperan dalam mengonversi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik melalui proses elektoral. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik berfungsi tidak hanya sebagai alat representasi, tetapi juga sebagai mesin kompetisi yang menentukan arah distribusi kekuasaan dalam negara.

Fungsi Partai Politik di Ranah Elektoral

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik tidak hanya ditujukan untuk menjalankan fungsi representasi politik, tetapi juga memiliki peran strategis

dalam arena elektoral. Sigit Pamungkas (2011) menegaskan bahwa fungsi partai dalam ranah elektoral merupakan inti dari keberadaan partai politik itu sendiri, karena dari proses inilah partai memperoleh legitimasi kekuasaan secara konstitusional. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks elektoral, partai memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi kandidasi, fungsi *marketing* politik, dan fungsi mobilisasi pemilih. Ketiga fungsi ini membentuk satu kesatuan sistemik yang menentukan sejauh mana partai mampu mengelola dukungan rakyat dan mempertahankan eksistensinya dalam kompetisi politik yang demokratis.

Menurut Sigit Pamungkas (2011), fungsi elektoral partai adalah manifestasi dari orientasi kekuasaan yang sah. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak dapat diperoleh melalui kekuatan fisik atau kooptasi birokrasi, melainkan melalui dukungan rakyat yang disalurkan lewat mekanisme pemilu. Oleh karena itu, keberhasilan partai diukur dari efektivitasnya menjalankan ketiga fungsi elektoral tersebut secara berkesinambungan mulai dari proses pencalonan kandidat, penyusunan strategi komunikasi politik, hingga penggerakan massa pemilih di tingkat akar rumput.

Pandangan Sigit diperkuat oleh Thomas Meyer (2012) yang menyatakan bahwa fungsi elektoral partai merupakan “rantai penghubung” antara ideologi dan praktik politik. Dalam perspektif Meyer, partai yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai ideologis ke dalam strategi elektoral cenderung kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, profesionalisasi dan modernisasi partai dalam ranah elektoral menjadi kebutuhan mutlak bagi sistem demokrasi yang stabil.

Selain itu, Lutfi dan Satriawan (2015) menegaskan bahwa di Indonesia fungsi partai politik dalam konteks elektoral tidak dapat dipisahkan dari karakter kelembagaan partai itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa efektivitas partai dalam pemilu bergantung pada dua faktor: pertama, seberapa kuat struktur internal partai menjalankan proses kandidasi; kedua, seberapa adaptif partai dalam menyesuaikan strategi komunikasi politiknya terhadap perubahan perilaku pemilih.

Fungsi partai dalam ranah elektoral tidak hanya sekadar aktivitas kampanye menjelang pemilu, melainkan keseluruhan proses politik yang berlangsung terus-menerus. Ia mencakup tahapan rekrutmen kandidat, pembentukan citra politik, dan mobilisasi dukungan publik yang bersama-sama membentuk “mesin elektoral” partai. Sigit Pamungkas (2011) menekankan bahwa kegagalan partai dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi ini akan berdampak langsung pada penurunan legitimasi politik, melemahnya dukungan pemilih, serta tergerusnya peran partai sebagai saluran utama aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi.

a. Fungsi Kandidasi

Fungsi kandidasi merupakan fungsi paling mendasar dalam ranah elektoral partai politik. Sigit Pamungkas (2011) menjelaskan bahwa fungsi ini berkaitan langsung dengan mekanisme rekrutmen politik dan proses seleksi calon pemimpin yang akan diusung oleh partai dalam kontestasi elektoral. Melalui fungsi kandidasi, partai menentukan figur yang dianggap mampu mewakili visi, ideologi, serta kepentingan politik partai di hadapan publik. Kandidasi menjadi tahap awal yang menentukan kualitas representasi dan kredibilitas elektoral suatu partai.

Menurut Sigit Pamungkas (2011), proses kandidasi seharusnya dilakukan secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi. Calon yang dipilih hendaknya mencerminkan aspirasi masyarakat sekaligus memenuhi standar integritas dan kapasitas kepemimpinan. Namun, dalam praktik politik Indonesia, mekanisme kandidasi sering kali bersifat elitis dan tertutup. Keputusan pencalonan umumnya ditentukan oleh elite partai di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan suara kader di tingkat daerah atau basis pemilih. Pola seperti ini menunjukkan lemahnya demokrasi internal partai serta kuatnya pengaruh patronase dalam menentukan calon yang diusung.

Lutfi dan Satriawan (2015) menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi partai politik di Indonesia adalah membangun sistem kandidasi yang partisipatif dan bebas dari intervensi elite. Mereka mengkritik proses kandidasi yang sering kali didorong oleh kepentingan finansial dan pertimbangan pragmatis, yang menyebabkan partai kehilangan fungsi representatifnya di mata publik. Ketika proses seleksi lebih menekankan pada kekuatan ekonomi atau kedekatan personal, partai berpotensi mengalami penurunan legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat.

Secara kelembagaan, Katz dan Mair (1993) dalam *Model Three Faces of Party Organization* menempatkan fungsi kandidasi sebagai interaksi antara *party central office* dan *party on the ground*. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menimbulkan delegitimasi kandidat yang dihasilkan. Apabila keputusan kandidasi didominasi oleh elite pusat, maka akar sosial partai di tingkat lokal akan melemah.

Sebaliknya, jika struktur lokal dilibatkan dalam proses seleksi, partai akan memperoleh legitimasi sosial dan dukungan yang lebih luas.

Sigit (2011) juga berpendapat bahwa fungsi kandidasi mencerminkan kemampuan partai dalam mengelola konsolidasi internal. Melalui proses pencalonan, partai diuji sejauh mana mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan elite dan kader di tingkat bawah. Kandidasi yang tidak demokratis sering kali menimbulkan konflik internal, menurunkan motivasi kader, serta melemahkan loyalitas pemilih.

Meyer (2012) menambahkan bahwa profesionalitas partai dapat diukur melalui kualitas mekanisme kandidasi yang dijalankan. Partai yang membuka ruang partisipasi publik dan memiliki prosedur seleksi calon yang objektif cenderung lebih dipercaya pemilih karena dianggap menjalankan prinsip akuntabilitas politik. Proses seleksi yang terlembaga juga berperan penting dalam memperkuat citra partai sebagai organisasi modern yang kompeten dan bertanggung jawab.

Fungsi kandidasi berperan sentral dalam menentukan arah keberhasilan partai di ranah elektoral. Kualitas proses pencalonan memiliki implikasi langsung terhadap kinerja elektoral partai, baik dalam menjaga konsistensi ideologis maupun memperluas basis dukungan pemilih. Ketika partai gagal menjalankan fungsi ini secara meritokratik, peluang terjadinya penurunan kepercayaan publik dan fragmentasi internal partai menjadi semakin besar.

b. Fungsi Marketing Politik

Fungsi *marketing* politik menjelaskan bagaimana partai politik mengelola komunikasi dan strategi persuasi untuk memperoleh dukungan publik dalam

kontestasi elektoral. Dalam demokrasi modern, keberhasilan partai tidak hanya bergantung pada kekuatan ideologis atau struktur organisasional, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pemilih dan mengemas pesan politik secara efektif. Firmanzah (2008) menjelaskan bahwa marketing politik merupakan proses strategis yang mencakup riset pasar politik, segmentasi pemilih, serta pengembangan program dan citra politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, partai berperan seperti “organisasi pemasaran” yang menjual gagasan, nilai, dan figur kepada publik.

Menurut Firmanzah (2008), *marketing* politik tidak boleh dipahami sebagai manipulasi citra semata, tetapi sebagai proses komunikasi yang bersifat dua arah antara partai dan masyarakat. Partai yang efektif adalah yang mampu mendengarkan aspirasi publik, menganalisis kebutuhan sosial, lalu merumuskan pesan politik yang relevan dan realistis. *Marketing* politik yang baik tidak berhenti pada kampanye elektoral, melainkan berlanjut dalam upaya menjaga hubungan jangka panjang dengan pemilih melalui konsistensi kebijakan dan komitmen moral.

Thomas Meyer (2012) mengaitkan *marketing* politik dengan proses rasionalisasi partai di era demokrasi media. Ia menilai bahwa dalam masyarakat yang semakin terbuka dan berorientasi pada informasi, partai harus beradaptasi terhadap logika komunikasi publik. Meyer menegaskan bahwa marketing politik menjadi sarana bagi partai untuk membangun *political legitimacy* melalui penciptaan citra yang kredibel dan pesan politik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis. Keterampilan mengelola citra bukanlah bentuk komersialisasi

politik, melainkan mekanisme agar partai tetap relevan di tengah perubahan orientasi pemilih.

Dalam konteks kelembagaan, Katz dan Mair (1993) menjelaskan bahwa munculnya orientasi marketing di tubuh partai merupakan konsekuensi dari pergeseran tipe partai modern. Partai yang sebelumnya berkarakter massa dan ideologis berkembang menjadi *catch-all parties*, yang berusaha menarik dukungan lintas kelas sosial dan latar belakang politik. Dalam tipe ini, keberhasilan partai diukur dari kemampuan menarik simpati publik melalui strategi komunikasi, bukan semata kekuatan organisasi. Marketing politik menjadi perangkat penting untuk membangun fleksibilitas strategi tanpa kehilangan identitas kelembagaan partai.

Lutfi dan Satriawan (2015) menyoroti penerapan *marketing* politik dalam konteks Indonesia. Mereka menilai bahwa partai-partai di Indonesia masih menghadapi dilema antara menjaga idealisme ideologis dan menyesuaikan strategi komunikasi dengan dinamika perilaku pemilih. *Marketing* politik sering kali digunakan secara pragmatis, berfokus pada pencitraan jangka pendek ketimbang membangun relasi politik yang berkelanjutan. Ketika marketing dijalankan tanpa basis nilai dan riset sosial yang memadai, pesan politik menjadi dangkal dan kehilangan daya persuasi terhadap pemilih rasional.

Marketing politik pada akhirnya berfungsi sebagai jembatan antara partai dan masyarakat dalam ranah elektoral. Melalui strategi ini, partai berupaya menerjemahkan nilai dan programnya ke dalam bentuk komunikasi yang mudah dipahami dan menarik bagi publik. Kualitas fungsi marketing politik menentukan

seberapa besar kemampuan partai dalam memperluas dukungan pemilih dan mempertahankan legitimasi elektoralnya di tengah kompetisi demokratis.

c. Fungsi Mobilisasi Pemilih

Fungsi mobilisasi pemilih menunjukkan kemampuan partai politik dalam menggerakkan dukungan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses elektoral. Mobilisasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan strategi partai dalam memperoleh legitimasi politik melalui pemilu. Thomas Meyer (2012) menyatakan bahwa mobilisasi merupakan perwujudan hubungan dinamis antara partai dan konstituen yang dibangun melalui aktivitas komunikasi politik, kampanye, dan konsolidasi organisasi. Bagi Meyer, keberhasilan mobilisasi tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Menurut Timothy Sisk (2017), mobilisasi politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang mendorong masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ia menegaskan bahwa mobilisasi yang efektif harus bersifat partisipatif dan berorientasi pada peningkatan kesadaran politik, bukan hanya sekadar upaya memperoleh suara. Dalam kerangka ini, partai politik berperan sebagai fasilitator demokrasi yang memperluas ruang partisipasi politik rakyat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan publik yang berkelanjutan.

Katz dan Mair (1993) menempatkan fungsi mobilisasi dalam dimensi *party on the ground*, yakni jaringan organisasi partai di tingkat akar rumput. Melalui jaringan ini, partai melakukan konsolidasi dukungan dengan membangun kedekatan sosial dan emosional dengan pemilih. Struktur partai yang solid di

tingkat lokal menjadi faktor penting keberhasilan mobilisasi, karena memungkinkan partai menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara langsung.

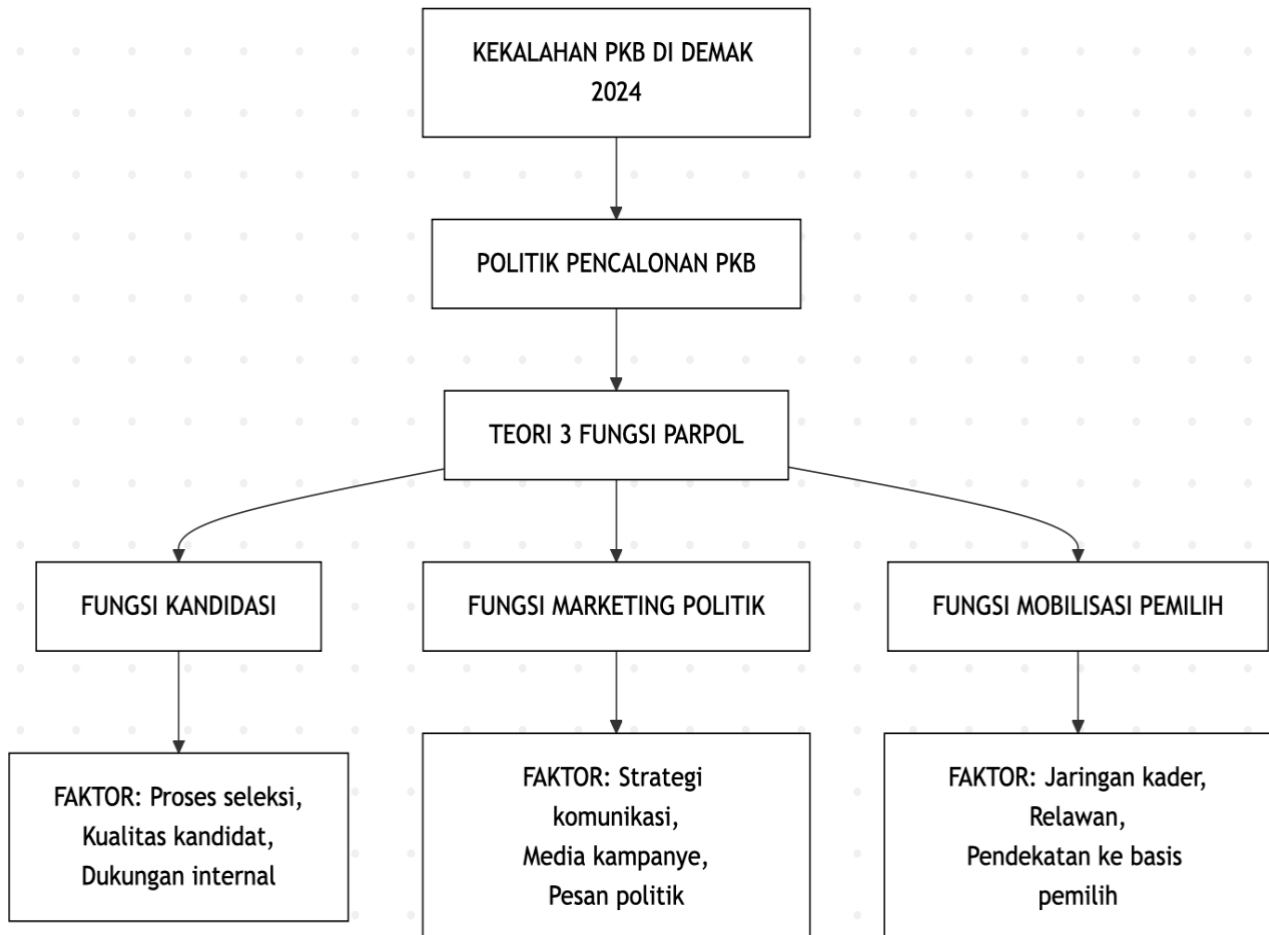
Dalam konteks politik Indonesia, Lutfi dan Satriawan (2015) menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih kerap dipengaruhi oleh hubungan patronase antara elite politik dan masyarakat. Pola mobilisasi berbasis patron-klien ini sering kali efektif dalam jangka pendek, tetapi berpotensi melemahkan kualitas demokrasi karena hubungan yang terbentuk bersifat transaksional dan tidak berbasis kesadaran politik. Ketika mobilisasi dilakukan melalui imbalan material atau kedekatan personal, partisipasi yang dihasilkan cenderung bersifat pragmatis, bukan ideologis.

Berenschot dan Aspinall (2020) juga menyoroti fenomena serupa. Mereka menemukan bahwa mobilisasi pemilih sering dijalankan melalui jaringan sosial informal, seperti organisasi keagamaan, kelompok relawan, atau asosiasi lokal yang berfungsi sebagai perantara antara kandidat dan pemilih. Jaringan ini memainkan peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan ketergantungan politik terhadap patron lokal dan sumber daya finansial.

Meyer (2012) menambahkan bahwa perubahan teknologi dan pola komunikasi publik menuntut partai untuk mengadaptasi strategi mobilisasi ke dalam ruang digital. Mobilisasi yang semula dilakukan secara hierarkis kini bertransformasi menjadi lebih horizontal melalui penggunaan media sosial dan jaringan komunitas daring. Pendekatan ini memungkinkan partai menjangkau segmen pemilih baru, terutama generasi muda yang memiliki karakter politik lebih kritis dan independen.

Fungsi mobilisasi pemilih dalam kerangka elektoral menunjukkan kemampuan partai untuk memadukan kekuatan organisasi, kedekatan sosial, dan strategi komunikasi politik. Partai yang memiliki jaringan kaderisasi kuat dan memahami dinamika perilaku pemilih akan lebih mampu mempertahankan loyalitas konstituen. Sebaliknya, partai yang bergantung pada mobilisasi berbasis patronase atau transaksi politik cenderung menghadapi penurunan legitimasi dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

1.5.4. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan tiga fungsi utama partai politik dalam ranah elektoral yakni fungsi kandidasi, fungsi marketing politik, dan fungsi mobilisasi pemilih menjadi sejumlah dimensi dan indikator yang dapat diamati melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai, tim pemenangan, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Demak.

Fungsi Partai Politik

1. Fungsi Kandidasi

Fungsi ini dioperasionalkan sebagai mekanisme rekrutmen, seleksi, dan penetapan calon kepala daerah yang diusung partai.

- Indikator demokrasi internal: sejauh mana kader dan struktur lokal dilibatkan dalam proses seleksi calon.
- Indikator patronase politik: adanya dominasi *elite* pusat atau patron lokal dalam menentukan kandidat.
- Indikator representasi sosial: kesesuaian latar belakang calon dengan basis sosial-keagamaan NU di Demak.
- Indikator kapasitas kandidat: penilaian terhadap integritas, kemampuan komunikasi, dan kedekatan figur dengan masyarakat.

2. Fungsi Marketing Politik

Fungsi ini dijabarkan dalam strategi komunikasi partai dan kandidat untuk membangun citra, menyampaikan pesan politik, dan menarik simpati pemilih.

- Indikator strategi komunikasi: bentuk pesan politik yang digunakan (religius, programatik, atau personalistik).
- Indikator media kampanye: penggunaan media massa, media sosial, dan jaringan keagamaan untuk sosialisasi kandidat.
- Indikator segmentasi pemilih: upaya partai mengenali serta menyesuaikan pesan terhadap kelompok pemilih (pemilih muda, santri, petani, dsb.).
- Indikator efektivitas pesan: persepsi publik terhadap daya tarik kampanye dan kredibilitas kandidat PKB dibanding lawan politik.

3. Fungsi Mobilisasi Pemilih

Fungsi ini menunjukkan kemampuan partai dalam menggerakkan dukungan masyarakat pada tahap kampanye dan pemungutan suara.

- Indikator jaringan akar rumput: kekuatan dan konsistensi struktur PKB di tingkat desa, pengurus ranting, dan kader lapangan.
- Indikator hubungan patronase: pola pemberian insentif atau imbalan material dalam mobilisasi suara.
- Indikator partisipasi ideologis: tingkat kesadaran politik dan loyalitas warga NU terhadap PKB.
- Indikator mobilisasi digital dan relawan: peran media sosial dan kelompok relawan dalam memperluas dukungan.

Keseluruhan indikator ini menjadi pedoman dalam penyusunan panduan wawancara. Melalui indikator tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana PKB menjalankan fungsi elektoralnya secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural, strategis, dan kultural yang menyebabkan kekalahan partai pada Pilkada Demak 2024.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024. Fenomena tersebut bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur dengan angka-angka, melainkan perlu dipahami melalui interpretasi terhadap pengalaman, pandangan, serta tindakan para aktor politik yang terlibat.

Sementara itu, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena politik pencalonan serta faktor-faktor yang memengaruhi kekalahan PKB secara rinci. Menurut Sugiyono (2013), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara faktual dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah Kabupaten Demak, dengan fokus pada proses politik pencalonan dan faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan PKB dalam Pilkada Demak tahun 2024. Ruang lingkup tersebut mencakup dinamika internal partai, strategi kampanye, relasi antara elite partai dan kandidat, serta persepsi pemilih terhadap figur dan partai dalam kontestasi lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti konteks sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Demak sebagai basis historis PKB yang memiliki keterikatan kuat dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini tidak hanya membahas aspek elektoral secara teknis, tetapi juga

menelaah interaksi antara identitas keagamaan dan politik praktis dalam menentukan hasil Pilkada.

Secara *temporal*, penelitian ini berfokus pada periode menjelang dan sesudah Pilkada Demak 2024, dengan penelusuran data sejak tahap pencalonan, kampanye, hingga hasil akhir pemilihan. Ruang lingkup ini memungkinkan analisis yang menyeluruh mengenai bagaimana strategi politik PKB dan dinamika sosial pemilih berkontribusi terhadap hasil Pilkada yang tidak sesuai dengan ekspektasi partai.

1.6.3. Fenomena Penelitian

Fenomena dalam penelitian kualitatif merupakan suatu gejala sosial yang muncul secara alamiah dan harus dipahami maknanya secara mendalam dari sudut pandang para pelaku atau partisipan yang terlibat (Sugiyono, 2013). Fenomena penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti, melainkan dipahami sebagaimana adanya melalui pengamatan langsung terhadap situasi sosial di lapangan.

Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kekalahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pilkada Demak tahun 2024, meskipun partai tersebut memiliki basis politik dan sosial yang kuat di wilayah tersebut. Kekalahan ini menjadi menarik karena bertentangan dengan kecenderungan historis di mana PKB selama ini selalu diidentikkan dengan kekuatan politik berbasis Nahdlatul Ulama (NU) dan kultur Islam tradisional yang dominan di Demak.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran perilaku pemilih, di mana afiliasi keagamaan dan ideologis tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu pilihan politik. Dinamika politik lokal menunjukkan keterlibatan berbagai

faktor seperti kekuatan figur kandidat, strategi komunikasi politik, pengaruh elite lokal, hingga kepentingan ekonomi yang berkelindan dalam proses pencalonan dan kampanye.

Selain itu, fenomena kekalahan PKB di Demak juga dapat dipahami sebagai refleksi dari transformasi politik lokal di era demokrasi elektoral, di mana loyalitas tradisional mulai terkikis oleh rasionalitas dan pragmatisme politik. Dengan kata lain, penelitian ini melihat fenomena tersebut sebagai representasi perubahan sosial-politik yang lebih luas di tingkat lokal, di mana identitas keagamaan, struktur patronase, dan strategi elektoral berinteraksi secara kompleks dalam menentukan hasil akhir kontestasi politik.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap paling memahami fenomena penelitian, yaitu Ketua DPC PKB Kabupaten Demak atau pihak yang mewakilinya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Demak turut dilibatkan sebagai informan triangulasi guna memperkuat validitas temuan, khususnya terkait persepsi publik terhadap PKB dalam Pilkada Demak 2024. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, arsip PKB, pemberitaan media, hasil survei elektoral, serta literatur akademik terkait. Kedua jenis data tersebut digunakan secara komplementer untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024.

1.6.5. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam konteks penelitian ini, informan utama dibatasi pada Ketua DPC PKB Kabupaten Demak atau pihak yang mewakilinya, mengingat posisinya yang memiliki pemahaman langsung terhadap dinamika internal partai serta proses pencalonan dalam Pilkada Demak 2024.

Selain itu, akademisi dan/atau perwakilan LSM yang memiliki perhatian dan kajian terhadap politik lokal dan demokrasi di Kabupaten Demak ditetapkan sebagai informan pendukung. Kehadiran informan ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif analitis yang lebih objektif dan kritis terhadap faktor-faktor struktural maupun kontekstual yang memengaruhi kekalahan PKB. Masyarakat Kabupaten Demak juga dilibatkan sebagai informan triangulasi guna memperkuat validitas data, khususnya dalam menggali persepsi pemilih terhadap PKB serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik mereka dalam Pilkada Demak 2024. Dengan komposisi informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan terfokus mengenai penyebab kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024..

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang dianggap paling mengetahui peristiwa dan dinamika politik Pilkada Demak 2024. Wawancara

dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman informan secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah H. Zayinul Fata, S.E., selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Demak (atau pihak yang mewakilinya), karena memiliki pemahaman langsung mengenai proses pencalonan, dinamika internal partai, strategi politik, serta evaluasi terhadap hasil Pilkada Demak 2024.

Selain itu, informan dari unsur LSM, yaitu perwakilan Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII Kabupaten Demak, dilibatkan untuk memberikan perspektif independen dan analitis terkait dinamika demokrasi lokal, perilaku pemilih, serta faktor-faktor kelembagaan yang memengaruhi kontestasi Pilkada. Masyarakat Kabupaten Demak juga dilibatkan sebagai informan triangulasi guna memperkuat validitas temuan penelitian, khususnya dalam menggali persepsi publik terhadap PKB dan alasan di balik preferensi politik mereka. Melalui wawancara mendalam dengan ketiga kelompok informan tersebut, penelitian ini berupaya memahami perspektif internal partai, analisis masyarakat sipil, serta pembacaan masyarakat secara langsung mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024.

Kedua, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis dan arsip resmi yang mendukung hasil wawancara. Sumber data dokumentatif meliputi dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Demak, arsip PKB, pemberitaan media massa, hasil survei elektoral, serta kajian akademik terkait Pilkada Demak 2024. Menurut Sugiyono (2013), teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap sekaligus sarana verifikasi terhadap data yang

diperoleh melalui wawancara, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan valid.

Kedua teknik tersebut digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Data yang diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan hasil dokumentasi untuk memastikan keabsahan informasi dan membangun pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Sugiyono (2013), analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi pola, tema, atau teori. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pada tahap reduksi data (*data reduction*), peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dinamika politik pencalonan dan faktor penyebab kekalahan PKB dalam Pilkada Demak 2024. Tahap ini membantu peneliti untuk mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi agar lebih terarah.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), di mana hasil reduksi disusun dalam bentuk naratif yang sistematis agar hubungan antarkomponen dapat dipahami dengan jelas. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan pandangan informan,

dinamika internal partai, serta interaksi sosial-politik yang memengaruhi hasil Pilkada.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu proses menginterpretasikan makna dari data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan kausal, maupun makna mendalam di balik fenomena politik yang dikaji. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi, guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.

Dengan menerapkan ketiga tahapan tersebut secara simultan dan berulang, peneliti dapat menghasilkan analisis yang tajam, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif deskriptif.